

**MARKAS BESAR
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERGURUAN TINGGI ILMU KEPOLISIAN**



11.301.

**PIDATO DIES NATALIS KE-56 PTIK
DALAM RANGKA
WISUDA SARJANA ILMU KEPOLISIAN
ANGKATAN XXXVII / DHIRA DHARMIKA**

Oleh :

**Richard Hugh Turton Gozney, CMG.
(Duta Besar Kerajaan Inggris untuk Indonesia)**



JAKARTA, 17 JUNI 2002

1. SAYA BERTERIMA KASIH BANYAK ATAS UNDANGAN DAN MERASA SENANG BERADA DI SINI HARI INI. SAYA BARU KEMBALI DARI LONDON TADI MALAM UNTUK MENDAMPINGI PRESIDEN MEGAWATI DALAM KUNJUNGAN BELIAU KE INGGRIS.
2. HARI INI MERUPAKAN SEMACAM “HARI UNTUK MASALAH HUKUM DAN KETERTIBAN” BAGI SAYA: PAGI INI BERSAMA KEPOLISIAN RI. NANTI SIANG SAYA AKAN BERSAMA MAHKAMAH AGUNG YANG MENYELENGGARAKAN SUATU SEMINAR YANG MELIBATKAN SEORANG PENGACARA DARI INGGRIS YANG TERKEMUKA.
3. HARI INI SAYA INGIN MENYAMPAIKAN SUATU ANEKDOT TENTANG MASALAH YANG TERJADI DISUATU HUTAN. SETELAH ITU SAYA AKAN MENYAMPAIKAN SEBUAH CERITA. SELANJUTNYA SAYA AKAN

**MENYAMPAIKAN ANEKDOT KEDUA,
MENGENAI SEBUAH TAS KERJA.**

- 4. YANG TERJADI DI HUTAN BAPAK FAROUK, YANG MEMIMPIN PTIK INI.**
- 5. SEKARANG CERITA MENGENAI BAGAIMANA KEPOLISIAN DI SUATU NEGARA YANG JAUH DARI INDONESIA TELAH BERUBAH SELAMA TIGAPULUH TAHUN TERAKHIR INI. SAYA TIDAK AKAN MENYEBUTKAN NAMA NEGARANYA SEKARANG INI. NAMUN, SEPERTI INDONESIA, NEGARA TERSEBUT MERUPAKAN NEGARA DEMOKRASI.**
- 6. CERITA INI DIMULAI TIDAK SAJA DENGAN KEPOLISIAN TETAPI DENGAN WARGA-NEGARA BIASA. 30 TAHUN YANG LALU KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP POLISI MULAI BERKURANG. ANGKA KRIMINALITAS MENINGKAT. RUMOR**

TENTANG ADANYA KORUPSI DI KEPOLISIAN SEMAKIN SERING. KADANG-KADANG DEMONSTRASI DAMAI BERAKHIR DENGAN KERUSUHAN DAN ORANG SIPIL TAK BERSENJATA TERLUKA. SINGKATNYA, KEPERCAYAAN MENURUN TERHADAP PIHAK KEPOLISIAN, DARI KOMUNITAS YANG SEBENARNYA HARUS MEREKA LAYANI. PRINSIP DASAR YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT BAHWA POLISI HARUS MELAYANI MASYARAKAT DENGAN PERSETUJUAN KOMUNITAS, TELAH DILANGGAR.

7. PADA TAHAP INI DALAM CERITA KITA, PARA POLITISI MUNCUL KEDEPAN. KETIDAKPUASAN YANG MELUAS TERHADAP KEPOLISIAN MERUPAKAN BERITA BURUK BAGI PARA POLITISI YANG INGIN DIPILIH KEMBALI. KETERTIBAN YANG KURANG BERPENGARUH PADA SETIAP ORANG, KAYA ATAU MISKIN, ORANG-ORANG DENGAN LATAR BELAKANG DAN KELOMPOK ETNIS

YANG BERBEDA, ORANG-ORANG DARI DAERAH PEDESAAN MAUPUN PERKOTAAN. BILA PARA POLITISI YAITU PARA MENTERI DAN ANGGOTA DPR INI, MAU BERTAHAN, TINDAKAN HARUS DIAMBIL.

- 8. TIGAPULUH TAHUN KEMUDIAN, TERJADI PERUBAHAN YANG BERARTI DALAM KEPOLISIAN. DAN BOLEH DIKATAKAN BAHWA TERJADI TIGA PERUBAHAN MENDASAR:**
- 9. YANG PERTAMA ADALAH BAHWA PARA POLITISI DAN DPR SETEMPAT TELAH MENGHASILKAN UNDANG-UNDANG BARU. DUA UNDANG-UNDANG PENTING DIUNDANGKAN YANG TELAH MENGHASILKAN PERUBAHAN-PERUBAHAN PENTING DALAM PERBUATAN PARA ANGGOTA KEPOLISIAN. MUNGKIN YANG TERPENTING ADALAH BAHWA UNDANG-UNDANG BARU**

ITU MEWAJIBKAN KEPOLISIAN BERKONSULTASI DENGAN KOMUNITAS SETEMPAT DAN DIKASIH KEWAJIBAN UNTUK MENGUTAMAKAN SETEMPAT.

10. HAL INI DIPERKUAT DENGAN SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN MELALUI PARA PEMBAYAR PAJAK PABRIK DI TIAP PROPINSI. PARA PEMBAYAR PAJAK SETEMPAT MENYUMBANG SETENGAH DANA OPERASIONAL KEPOLISIAN PROPINSI. PEMERINTAH PUSAT MEMBAYAR SISANYA. BADAN PENGAWASAN KEPOLISIAN SIPIL SETEMPAT DIBENTUK. HASILNYA ADALAH SUATU SISTEM YANG MEMBUAT KEPOLISIAN FOKUS PADA KEPENTINGAN-KEPENTINGAN SETEMPAT TETAPI BEROPERASI DENGAN STANDAR NASIONAL. INI MEMBERIKAN PENGAWASAN DAN PERIMBANGAN ANTARA PUSAT DAN WILAYAH. KADANG-KADANG HAL INI JUGA

MENYEBABKAN KETIDAK SEPAKATAN, NAMUN PERBEDAAN-PERBEDAAN DITANGANI DENGAN NEGOSIASI.

11. UNDANG-UNDANG BARU YANG KEDUA MEMASTIKAN POLISI MENANGANI MASALAH BUKTI, TUNTUTAN DAN PENAHANAN SESUAI DENGAN PERATURAN PERATURAN DAN SECARA TRANSPARAN. PERATURAN DIBERLAKUKAN YANG MENGHARUSKAN POLISI MENGIKUTI STANDAR KETAT. MEREKA YANG MENYALAH PERATURAN TIDAK SAJA DITEGURATAU DIALIHTUGASKAN; MEREKA JUGA DITUNTUT DAN DALAM SATU ATAU KASUS DIPENJARA.

12. UNTUK MEMBANTU MEMULIHKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT DALAM KASUS-KASUS DIMANA TERDAPAT KELUHAN SERIUS TERHADAP POLISI, SUATU BADAN

INDENPENDEN YANG MENANGANI KELUHAN TENTANG KEPOLISIAN DIDIRIKAN DIBAWAH SUATU UNDANG-UNDANG BARU. MASIH ADA DEBAT TENTANG BAGAIMANA MESTI MENJALANKAN MEKANISME INI.

13. PERUBAHAN BESAR LAINNYA ADALAH TINDAKAN YANG DIAMBIL TERHADAP PARA KORUPTOR. SERINGKALI ORANG MENGATAKAN BAHWA DIMANA ADA KEKUASAAN ADA KORUPSI. SAYA YAKIN BAHWA HAL INI BERLAKU DIMANAPUN DI DUNIA. DI NEGERA YANG SAYA BICARAKAN, MASALAH KORUPSI DI KEPOLISIAN BELUM SEPENUHNYA HILANG TETAPI BERKURANG. KEBERHASILAN INI SEBAGIAN MERUPAKAN HASIL DARI TEKAD PARA POLITISI BAHWA POLISI HARUS MENDAPATKAN KEMBALI KEPERCAYAAN MASYARAKAT. KEPOLISIAN PROPINSI DI MANA DIDUGA ADA KORUPSI DIPERIKSA OLEH KEPOLISIAN PROPINSI

LAINNYA DIBAWAH PIMPINAN PERWIRA SENIOR. HASILNYA SERINGKALI ADALAH PARA POLISI YANG TERLIBAT DIKELUARKAN DARI KEPOLISIAN ATAU DIPENJARA SELAMA BERTAHUN-TAHUN. HAL INI MENGEJUTKAN SEGALA PIHAK. PENGUJIAN TERPADU DIPERKENALKAN DAN SEKARANG MERUPAKAN PRAKTEK STANDAR DI KANTOR-KANTOR POLISI. MISALNYA, SEORANG ANGGOTA POLISI YANG MENYAMAR AKAN MENCOBA MENYUAP SEORANG ANGGOTA POLISI UNTUK MENGUJI KEJUJURANNYA.

14. PERUBAHAN BESAR KETIGA ADALAH DALAM HAL REKRUTMEN, PENGGAJIAN DAN PELATIHAN. HAL-HAL INI SANGATLAH PENTING DAN MUNGKIN YANG PALING MENARIK UNTUK YANG BARU MASUK KEPOLISIAN. PARA POLISI MENYADARI BAHWA INSENTIF JUGA DIPERLUKAN UNTUK

MENINGKATKAN MORAL. GAJI ANGGOTA POLISI NAIK PESAT. INVESTASI BESAR DILAKUKAN BAGI PELATIHAN ANGGOTA BARU. YANG TERPENTING ADALAH BAHWA PENGGAJIAN YANG LEBIH BAIK MENARIK CALON-CALON POLISI YANG BAIK, LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN YANG MEMPUNYAI TINGKAT PENDIDIKAN YANG MENCUKUPI. STATUS ANGGOTA POLISI NAIK DI MASYARAKAT.

15. MUNGKIN TIDAKLAH MENGEJUTKAN BAHWA SAYA TELAH BERBICARA MENGENAI CARA KEPOLISIAN BERUBAH DI NEGARA SAYA SENDIRI, INGGRIS. SAYA PIKIR CERITA INI MENGGAMBARAKAN BAHWA MUTU PROFESIONAL DI KEPOLISIAN MERUPAKAN HAL YANG DIBICARAKAN DI SEMUA NEGARA, BUKAN SAJA DI INDONESIA DENGAN DEMOKRASI BARUNYA.

16. JADI PELAJARAN-PELAJARAN APA YANG DAPAT DIPETIK OLEH POLISI DI INDONESIA DARI CERITA DI ATAS ? INGGRIS BERBEDA DENGAN INDONESIA DALAM BANYAK HAL NAMUN PERSAMAAN YANG KITA MILIKI ADALAH BAHWA INGGRIS DAN INDONESIA KEDUANYA ADALAH NEGARA DEMOKRASI. SAYA INGIN MENYAMPAIKAN DUA HAL SEBAGAI BAHAN PEMIKIRAN MENGENAI KEPOLISIAN YANG DAPAT BERLAKU UNTUK NEGARA-NEGARA DEMOKRASI BAIK YANG LAMA MAUPUN YANG BARU.

17. PERTAMA, BAHWA KEPOLISIAN DALAM SUATU DEMOKRASI HARUS DIDASARI ATAS PRINSIP PERSETUJUAN DARI MASYARAKAT. MELAYANI MASYARAKAT MERUPAKAN PRIORITAS, BUKAN HANYA MENJAGA KETERTIBAN DI MASYARAKAT. DAN INI PERLU DILAKUKAN TANPA MEMIHAK.

18. KEDUA, BAHWA PELAKSANAAN TUGAS KEPOLISIAN DALAM SUATU DEMOKRASI BUKAN HANYA MENGENAI KEBERHASILAN MENCAPAI HUKUM DAN KETERTIBAN, TAPI JUGA BAGAIMANA HAL TERSEBUT DICAPAI. AKHIRNYA, ANGGOTA KEPOLISIAN AKAN DITANGGUNG JAWABKAN. BAHKAN DALAM KEADAAN MEMELIHARA KETERTIBAN YANG PALING SULITPUN SEPERTI DALAM MENANGANI DEMONSTRASI ATAU MENANGANI TERORIS, INDIVIDU-INDIVIDU PERLU BERTANGGUNG JAWAB ATAS TINDAKAN MEREKA Masing-Masing.

19. SEKARANG SAYA INGIN MENYAMPAIKAN ANEKDOT MENGENAI TAS KERJA. OLEH KARENA ITULAH SAYA MEMUJI SIKAP PROFESIONAL DIANTARA PARA POLISI DI WILAYAH BOGOR.

20. JADI ANDA DAPAT MELIHAT BAHWA SAYA MEMILIKI KEPERCAYAAN, KEPERCAYAAN YANG BESAR, AKAN KEMAMPUAN DAN KAPASITAS POLRI. SAYA TAHU APA YANG DAPAT DILAKUKANNYA. SAYA BARU MENYAMPAIKAN CERITA YANG MUNGKIN DAPAT MEMPERLIHATKAN HAL-HAL TAMBAHAN YANG AKAN DILAKUKAN OLEH POLRI.

21. DARI SEMUA PELAYANAN MASYARAKAT YANG ADA, TIDAKLAH DAPAT DIPERTENTANGKAN BAHWA KEPOLISIAN ADALAH YANG PALING TERLIHAT, DAN KEPOLISIAN ADALAH YANG PALING TERLIBAT LANGSUNG DENGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. PEKERJAAN INI JUGA PALING MENANTANG. BERUNTUNGLAH INDONESIA BAHWA ANDA SEKALIAN DIPERSIAPKAN UNTUK MEMENUHI TANTANGAN TERSEBUT.



BRITISH AMBASSADOR TO INDONESIA
RICHARD HUGH TURTON GOZNEY, CMG
BORN 21. 7. 51

**RICHARD GOZNEY JOINED THE BRITISH DIPLOMATIC
SERVICE IN 1973**

**EDUCATION : MAGDALEN COLLEGE SCHOOL, OXFORD AND ST. EDMUND
HALL, OXFORD**

1970 - 73 TEACHER, TOM MBOYA RUSINGA SECONDARY SCHOOL, KENYA

FCO CAREER

**1973 ENTERED FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE
(EAST AFRICAN DEPARTMENT)**

1974 - 78 JAKARTA (3RD SECRETARY)

1978 - 81 BUENOS AIRES (2ND SECRETARY)

1981 - 84 FCO (DEFENCE DEPARTMENT)

1984 - 88 MADRID (1ST SECRETARY, HEAD OF CHANCERY)

**1989 - 90 FCO (ASSISTANT PRIVATE SECRETARY, SECRETARY OF STATE'S
OFFICE)**

1990 - 93 FCO (PRIVATE SECRETARY, SECRETARY OF STATE'S OFFICE)

1993 - 93 ON LOAN AT CHATHAM HOUSE

1993 - 96 MBABANE, SWAZILAND (HIGH COMMISSIONER)

1996 - 98 FCO (HEAD OF SECURITY POLICY DEPARTMENT)

1998 - 00 ON LOAN AT CABINET OFFICE, CHIEF. OF ASSESSMENTS STAFF

MARRIED DIANA EDWINA GOZNEY (1982)

CHILDREN : JAMES AND ALEXANDER

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1984 POLICE AND CRIMINAL EVIDENCE ACT, HMSO.

1996 POLICE ACT, HMSO.

WORKING THE STREET : POLICE DISCRETION AND
THE DILEMMAS OF REFORM, MICHAEL K. BROWN,
1990

POLICE ADMINISTRATION AND PROGRESSIVE
REFORM, JAY STUART BERMAN, 1998

